

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terciptanya masyarakat yang sejahtera merupakan cita-cita bagi semua negara di dunia ini, tak terkecuali negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Cita-cita tersebut tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam proses menciptakan masyarakat yang sejahtera harus dilaksanakan pembangunan. (Todaro,2013) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomi dan sosial.

Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, salah satunya yaitu permasalahan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pada angka distribusi pendapatan tinggi akan menciptakan jurang pemisah antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Masalah distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang kedua adalah pemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk.

Jika distribusi pendapatan merata dengan sempurna (absolute) maka setiap penduduk menerima pendapatan yang sama besarnya. Jumlah pendapatan perkapita tidak menggambarkan pendapatan yang diterima oleh penduduk merata atau tidak meratanya. Karena pemerataan pendapatan salah satu masalah penting dalam pembangunan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan.

Menurut (Todaro,2004) ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Dampak negatif dari ketimpangan inilah yang akan menimbulkan masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ketimpangan merupakan suatu tantangan pembangunan yang harus dihadapi karena dapat menyulitkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan.

Pemerataan distribusi pendapatan pada suatu daerah dapat menyebabkan proses pertumbuhan daerah yang cepat, sedangkan jika tidak adanya pemerataan daerah tersebut akan tertinggal dalam pertumbuhan daerahnya. Maka daerah-daerah yang tidak mengalami pemerataan tersebut disebabkan kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor) lebih memilih daerah yang memiliki sarana dan prasarana seperti perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil (Barika, 2012). Menurut (Kuncoro,2004) dengan tidak meratanya investor yang masuk maka akan menimbulkan dampak negatif untuk daerah tersebut seperti kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan adanya pengangguran. Dan juga berdampak adanya ketimpangan distribusi pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi kepada daerah seperti kota atau kabupaten.

**Tabel 1.1**  
**Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2011-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Gini</b>
<b>2011</b>	0,37
<b>2012</b>	0,40
<b>2013</b>	0,37
<b>2014</b>	0,39
<b>2015</b>	0,42
<b>2016</b>	0,41
<b>2017</b>	0,39
<b>2018</b>	0,37

Sumber : BPS Kota Surabaya Tahun 2011-2018 diolah

Sebagai salah satu kota di pulau Jawa, Surabaya memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang berfluktuasi setiap tahunnya hal tersebut dapat dilihat pada angka Gini Ratio pada tabel 1.1 mengenai tingkat ketimpangan yang ada di Kota Surabaya pada Tahun 2011-2018 yang diukur menggunakan rasio gini.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya pada tahun 2011-2018 cenderung berfluktuasi, terdapat kenaikan gini ratio pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,03 dari tahun sebelumnya. Mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2013 sebesar 0,37 meningkat di tahun 2014 sebesar 0,39 dan tahun 2014 sebesar 0,42. Sedangkan pada tahun 2016 hingga 2018 cenderung mengalami penurunan. Jika dilihat pada gini ratio Kota Surabaya tahun 2011-2018 masih berada pada ketimpangan distribusi pendapatan yang sedang.

Menurut Simon Kuznets (1995), meningkatnya ketimpangan pendapatan disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak tahapan awal pembangunan, lalu pada tahapan berikutnya akan meratakan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini mencerminkan perubahan struktural dari sektor tradisional pertanian ke sektor modern industri. Proses industrialisasi dari sektor pertanian ini dibarengi oleh investasi modal sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja yang berlebihan dari sektor pertanian. Sektor pertanian dan sektor industri juga memiliki tingkat upah yang berbeda, tingkat upah pekerja untuk sektor industri lebih tinggi dibandingkan upah pekerja untuk sektor pertanian.

Investasi modal sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing akan memberikan banyak manfaat salah satunya penyerapan tenaga kerja yang banyak dan transfer teknologi. Hal ini sangat cocok bagi negara berkembang karena negara Indonesia memiliki jumlah penduduk atau tenaga kerja yang berlebihan serta kurang memiliki teknologi yang mumpuni untuk mengelola sumber daya yang ada. Selain itu penanaman modal asing juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan sejalan dengan penelitian (Nunnenkam,2011). Menurut (Manning,1995), menerima banyak modal asing akan menyebabkan kurang meratanya distribusi pendapatan sebagai

dampak tingginya upah yang dibayarkan kepada para pekerja asing dibandingkan tenaga kerja dalam negeri.

Yang menjadi masalah adalah ketika investasi terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah atau sektor tertentu saja. Hal ini dikarenakan para investor yang lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada daerah yang memiliki infrastruktur yang baik dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan para investor juga memilih berinvestasi pada sektor yang menurutnya menjanjikan saja. Hal ini membuat daerah yang banyak menerima investasi dengan daerah yang kurang menerima investasi akan memiliki perbedaan dalam pendapatan yang diperoleh masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan daerah/wilayah.

Perbedaan ini dapat menjadikan indeks pembangunan manusia sebagai salah satu alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran indeks pembangunan manusia yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan yang layak dimana ketiga ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut di samping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya akan menjadikan kompetisi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi sangat ketat. Menurut penelitian yang dilakukan Fulgsang (2013), pertumbuhan jumlah penduduk akan

meningkatkan angka ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja. Banyaknya penawaran tenaga kerja menjadikan tenaga kerja kelas bawah akan dibayar upah yang sedikit atau di bawah standar upah minimum.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disatu sisi dan melebarnya ketimpangan di sisi lain, sesungguhnya mengungkapkan banyak hal: (1) kemajuan ekonomi kota Surabaya lebih bias ke kelompok masyarakat kelas atas (*top level*) ketimbang kelas bawah (*bottom level*); (2) orang-orang kaya memperoleh irisan "kue ekonomi" yang semakin besar relatif terhadap orang-orang miskin seiring dengan kemajuan ekonomi Surabaya; (3) secara implisit, fakta ini menunjukkan bahwa desain kebijakan selama ini lebih diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ketimbang mewujudkan pemerataan; dan (4) jika fenomena ini terus berlanjut di masa depan, maka akan terjadi pemusatan penguasaan aset dan mesin ekonomi pada kelompok tertentu saja, dan tentu saja, memiliki efek merusak dalam jangka panjang, terutama dilihat dari aspek stabilitas sosial, politik dan keamanan (Agussalim, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul " Pengaruh investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap distribusi ketimpangan pendapatan di Kota Surabaya tahun 2011-2018"

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh investasi secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kota Surabaya Tahun 2011-2018 ?
2. Apakah ada pengaruh secara parsial indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kota Surabaya Tahun 2011-2018 ?
3. Apakah ada pengaruh secara parsial jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kota Surabaya Tahun 2011-2018 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara parsial pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kota Surabaya Tahun 2011-2018
2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara parsial pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kota Surabaya Tahun 2011-2018

3. Untuk menganalisis dan membuktikan secara pasrial pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan terhadap ketimpangan di kota Surabaya Tahun 2011-2018

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sebagai media menempah dan mengembangkan kemampuan serta wawasan sesuai dengan disiplin ilmu yang di pelajari.
- Dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- Mengetahui skala ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya pada tahun 2011-2018.
- Untuk di jadikan acuan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan di setiap tahunnya.
- Untuk menjadi rujukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam proses perencanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi pada Kota Surabaya.